



Pengantar:

Prof. Dr. KH Said Aqil Siradj, M.A
(Ketua Umum PBNU)

NU MENGAWAL PERUBAHAN ZAMAN

Prof. Dr. Moh Mukri, M.Ag, dkk

Editor
Ila Fadilasari



NU Mengawal Perubahan Zaman

Penulis

Dr. Abdul Syukur, M.Ag
Akhamad Syarif Kurniawan, S.Ag
Dr. Aom Kharomani, S.Pd
Dr. Erina Pane, S.H, M.H
Fatikhatul Khoiriyah, SHI, M.H
Fauzi, S.E, M.Kom, Akt
Gatot Arifianto
Dr. K.H Khairuddin Tahmid, S.Hi, M.H
Khalida, S.H
M. Iwan Satriawan, S.H, M.H
Maskut Chandranegara
Prof. Dr. Moh Mukri, M.Ag
Rudy, SH, L.LM, L.LD
Titut, S.Ag., M.E.Sy

Editor

Ila Fadilasari S.Sos, M.H

Sampul dan Tata Letak

Tri Purna Jaya

Cetakan Pertama, Januari 2016

14 x 21 cm

xii + 147 hlm

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang Mengutip atau Memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN: 978-602-73592-0-8

Penerbit

Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) PWNu Lampung
Jalan Cut Mutia, Telukbetung Utara
Bandar Lampung
35214
telp: (0721) 474501
email: ltnnu.lampung@yahoo.com

Dinamika Perubahan NU Dalam Mengawal Zaman

Oleh: Rudy

*NU dalam perkembangannya mau tidak mau harus berhadapan
dengan kondisi perubahan zaman*
(KH Sahal Mahfudh)

Pendahuluan

Nahdlatul Ulama (NU), tidak dipungkiri lagi, merupakan organisasi sosial keagamaan yang sangat besar dan berpengaruh di Indonesia. Sejarah mencatat, NU lahir dan besar jauh sebelum Indonesia merdeka. Sejarah kelahiran NU bisa dilacak sejak kebangkitan nasional yang diikuti oleh terbentuknya organisasi pergerakan, Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916. Sampai akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H yang bertepatan dengan 31 Januari 1926.

NU pertama kali dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, KH. Hasyim Asy'ari merumuskan Kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian dikejawantahkan dalam Khittah NU, yang dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik. Dengan demikian, berbicara NU tidak hanya berbicara soal keagamaan, namun sesuatu yang lebih luas dari itu.

Sementara itu, sebagai bagian dari dunia yang luas, Indonesia ikut berubah. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia telah melewati proses perubahan yang sangat besar. Bahkan reformasi menjelang zaman millenium dianggap sebagai suatu lompatan yang besar. Ya, zaman telah berubah dengan sangat signifikan.

Seiring dengan perkembangan Negara Bangsa Indonesia, NU kemudian menjadi semakin besar. Hal ini tidak bisa dipungkiri sebagai implikasi dari keikutsertaan NU dalam proses berbangsa dan bernegara. Keadaan ini menyebabkan NU pun harus siap untuk mengawal perubahan zaman tersebut. Sebagai organisasi yang sangat besar, bahkan diklaim mempunyai basis anggota sebanyak lebih dari 65 juta jiwa, beban organisasi pun menjadi sangat besar. Oleh karena itu, desentralisasi peran dan fungsi organisasi dalam elemen-elemen lembaga dan badan otonom NU harus dipikirkan sesegera mungkin.

Dalam konteks perubahan zaman dan desentralisasi peran dan fungsi elemen-elemen NU, tulisan ini berusaha mengulas dinamika perubahan NU dan pemberdayaan elemen-elemen NU tersebut.

Dinamika Perubahan NU

NU lahir sebelum Indonesia merdeka. Sejarah NU diwarnai oleh perlawanan terhadap kolonialisme dengan membentuk organisasi pergerakan. Setelah berdiri Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air), tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Selanjutnya didirikanlah Nahdlatul Tujjar (Pergerakan Kaum Saudagar) yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat.

Elemen organisasi-organisasi sebagai basis pendirian NU pada tahun 1926 tersebut memberikan filosofi pendirian NU sebagai organisasi Islam yang mencakup elemen-elemen pemberdayaan kenegaraan, sosial politik, dan perekonomian. Pada masa sebelum kemerdekaan, peran NU memang lebih banyak dalam hal bela bangsa dan keagamaan khususnya membela keberagaman dan menolak pembatasan bermadzhab serta menolak penghancuran warisan peradaban.

Pada masa persiapan kemerdekaan, peran NU sangat besar pada perumusan fondasi konstitusional dalam pembentukan bangsa.¹ NU dalam hal ini merupakan gerakan Islam yang menyetujui Pancasila

¹ Andree Feillard, *NU Vis a vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Yogyakarta: LKIS, 1999, hal. 28-30.

sebagai jalan tengah antara negara agama dan negara sekuler.² Sampai saat ini NU merupakan ormas Islam pendukung Pancasila sebagai dasar kebangsaan.

Setelah kemerdekaan, pergolakan politik menyeret NU ke arah polemik politik nasional. Pada tahun 1952 NU keluar dari Masyumi dan menyatakan diri resmi sebagai partai politik. NU kemudian menjadi partai tersendiri dengan nama Partai Nahdlatul Ulama dan mengikuti Pemilu dari tahun 1955 dan 1971.³

Setelah mengalami bulan madu dengan ABRI dalam penumpasan PKI dan menjadi penopang berdirinya orde baru, NU secara pelan namun pasti dipinggirkan oleh orde baru. KH Sahal Mahfudh pada suatu ketika menyampaikan bahwa pada masa orde baru, NU dipinggirkan. "Ibarat main bola, pada masa orde baru, kita tak boleh main, tidak boleh menonton, bahkan mengintip saja sulit."

Terpinggirkannya peran NU pada masa orde baru membuat NU memutuskan untuk berada pada posisi penekan. Keputusan NU untuk berposisi pada tataran kelompok penekan (tidak berpolitik praktis) dapat disimak dalam muktamar NU ke-27 di Situbondo pada tahun 1984 yang kemudian lebih dikenal dengan gerakan kembali ke Khittah 1926. Pada muktamar tersebut semakin diteguhkannya dua model politik NU yaitu kerakyatan dan kenegaraan yang merupakan pengalaman ideal dalam sejarah NU. Konsep kerakyatan dan kenegaraan ini dianggap tepat untuk NU sebagai organisasi keagamaan yang berorientasi pada kebaikan dan kepentingan umum (*mashlahah 'ammah*).⁴

Gerakan kembali ke khittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih mau-

² *Ibid.* Lihat juga Syaiful Arif, *Humanisme Gusdur: Pergumulan dan Kemanusiaan*, Yogyakarta: Arruz Media, 2013. Hal. 19.

³ Pada pemilu 1955 partai Nahdlatul Ulama berhasil menduduki 3 besar perolehan partai dibawah PNI dan Masyumi dengan peroleh kursi nasional sebanyak 91 kursi, sedangkan dalam pemilu di masa awal orde baru tahun 1971 Partai NU berhasil menduduki peringkat dua dibawah Golkar dengan jumlah kursi 58. Lebih jelas lihat Andree Feillard, *Ibid.*

⁴ Syafiq Hasyim, *Tiga Jenis Politik NU*, dalam Kompas, 5 Juli 2004

pun sosial. Selain itu juga merumuskan kembali hubungan NU dengan negara.

Gerakan tersebut berhasil membangkitkan kembali gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU. Pada masa orde baru ini juga kaum muda NU mulai menjalin hubungan dengan dunia luar dan mendapat banyak *funding* dari donor internasional.⁵ Terbukanya hubungan dengan dunia luar memungkinkan adanya komunikasi dan masuknya ide-ide luar ke dalam pemikiran kaum muda NU.⁶ Saya melihat bahwa tekanan oleh orde baru mempunyai andil besar dalam beralihnya hubungan kaum muda NU dengan dunia luar.

Jatuhnya orde baru membuka pintu keterlibatan NU dalam politik bahkan Kiai Sahal menyebutkan bahwa keterbukaan pada masa reformasi memberikan NU ruang gerak untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara bangsa. Pada masa reformasi ini NU terkenal dengan sumbangsihnya dalam politik, demokrasi, dan HAM sebagai bagian dari pengaruh ilmu pengetahuan Barat.

Komunikasi dengan luar negeri dan mengalirnya ilmu pengetahuan Barat tidak luput dari kritikan misalnya kritik bahwa demokrasi dan hak asasi manusia tidak dirancang oleh kalangan NU sendiri, tetapi agenda yang didesakkan pada mereka. Akibatnya agenda neoliberal masuk dan mengubur pemikiran-pemikiran mendasar tentang kebangsaan dan sosial kerakyatan sebagai urat nadi pemikiran NU.⁷

Pada era demokrasi dan keterbukaan saat ini, NU tidak bisa dipungkiri lagi sedang berada di tengah-tengah kekuasaan dan mempunyai kekuatan perubahan. Beberapa menteri negara merupakan kader NU, ditambah banyak sekali kader NU mengisi posisi pemerintahan dan lembaga negara baik di pusat dan daerah. Di titik ini NU diuji, dan harus berhasil dalam mengawal perubahan bangsa.

⁵ Andree Feillard, *ibid.* Lihat juga Salahuddin Wahid, *Menggagas NU Masa Depan: Sebuah Pengantar*, dalam Adji Hermawan dkk, *Menggagas NU Masa Depan*, Jombang: Logos, 2010.

⁶ Abdul Mun'im DZ, *Memahami NU sebagai Madzhab Pemikiran*, Tashwirul Afkar, Edisi No. 19 Tahun 2006.

⁷ Abdul Mun'im DZ, *Memahami NU sebagai Madzhab Pemikiran*, Tashwirul Afkar, Edisi No. 19 Tahun 2006.

Namun demikian, peran NU yang begitu besar tersebut hanya terlihat di jalur politik dan kekuasaan. Sementara itu, masalah perekonomian, hukum, teknologi, pertanian, dan pendidikan masih menjadi permasalahan yang harus dipikirkan oleh NU. Bukankah NU tidak hanya hidup untuk politik?

Empowering NU dengan Sinergisitas

NU bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlul-sunnah Wal Jama'ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk mencapai tujuan tersebut, NU mempunyai tugas dan peran yang mencakup segala aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Di bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan. Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas.

Di bidang sosial-budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai ke-Islaman dan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat. Selain itu juga mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dinamika perubahan NU memberikan gambaran bahwa prinsip-prinsip dasar yang dicanangkan Nahdlatul Ulama telah diterjemahkan dalam perilaku kongkrit. NU banyak mengambil kepeloporan dalam sejarah bangsa Indonesia. Sejarah bangsa paling tidak mencatat bahwa NU sudah memberikan sumbangsih ke dalam beberapa titik bersejarah antara lain menghidupkan kembali gerakan pribumisasi Islam, sebagaimana diwariskan oleh para walisongo dan pendahulunya dan memelopori perjuangan kebebasan bermadzhab di Mekah, sehingga umat Islam sedunia bisa menjalankan ibadah sesuai dengan madzhab masing-masing.

Sumbangsih lainnya memelopori berdirinya Majelis Islami Al-Ikhtlâf Indonesia (MIAI) tahun 1937, yang kemudian ikut memperjuangkan tuntutan Indonesia berparlemen, memobilisasi perlawanan fisik terhadap kekuatan imperialis melalui Resolusi Jihad yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 1945. Ketika NU berubah menjadi partai politik, pada Pemilu 1955 berhasil menempati urutan ketiga dalam peroleh suara secara nasional.

NU juga memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) 1965 yang diikuti oleh perwakilan dari 37 negara dan memelopori gerakan Islam kultural dan penguatan *civil society* di Indonesia sepanjang dekade 90-an.

Demikianlah, dapat disimpulkan bahwa sejak awal berdirinya, NU sudah banyak menyumbangkan pemikiran dan perjuangan yang cukup besar bagi kemajuan negara bangsa. Sayangnya selama ini peran politik dan keagamaan NU terlalu menonjol. Sementara peran di bidang lain yaitu ekonomi, hukum, pertanian, teknologi, pers, pendidikan, dan kesenian budaya belum terberdayakan dengan maksimal. Peran yang lebih menonjol di bidang politik keagamaan ini tidaklah komprehensif dibandingkan tujuan besar NU.

Nahdlatul Ulama dibangun dengan empat prinsip nilai, yaitu *tawassut* (moderat), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (harmoni), dan *i'tidal* (konsisten). Prinsip ini terwujud dalam sikap menghargai nilai-nilai dan tradisi serta budaya sendiri dengan penyesuaian diri terhadap perubahan zaman serta menghargai kemanusiaan.

Sebagai organisasi sosial-keagamaan, Nahdlatul Ulama bertujuan untuk melaksanakan ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaah untuk membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi anggotanya serta masyarakat Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu peran lain perlu diberdayakan. NU akan kalah, habis dimakan sejarah, bila hanya mencurahkan energinya di bidang politik saja seperti yang menimpa PNI.

Sementara itu, NU⁸ mempunyai lembaga,⁹ lajnah,¹⁰ dan badan otonom¹¹ yang mempunyai fungsi dalam pemberdayaan peran-peran

⁸ Jumlah massa NU diperkiraan 60 juta jiwa tersebar seluruh Indonesia di bawah kepengurusan 33 wilayah dan 457 cabang serta ribuan anak cabang dan ranting, serta yang bernaung pada 14 Pengurus Cabang Istimewa NU di luar negeri: Saudi Arabia, Mesir, Syiria, Sudan, Inggris, Malaysia dan Australia/New Zealand dan lain-lain yang merupakan potensi bangsa yang sangat besar..

⁹ **Lembaga** adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama, khususnya yang berkaitan dengan bidang tertentu. Terdapat 14 Lembaga di NU yaitu: Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama disingkat LDNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan agama Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah; Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama disingkat LP Maarif NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pendidikan dan pengajaran formal; Rabithah Ma'ahid al Islamiyah disingkat RMI, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan; Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama disingkat LPNU bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama; Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama disingkat LPPNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pertanian, lingkungan hidup dan eksplorasi kelautan; Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama disingkat LKKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan; Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia disingkat LAKPESDAM, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia; Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama disingkat LPBHNU, bertugas melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi, dan kajian kebijakan hukum; Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia disingkat LESBUMI, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pengembangan seni dan budaya; Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama disingkat LAZISNU, bertugas menghimpun, mengelola dan mentasharufkan zakat dan shadaqah kepada mustahiqnya; Lembaga Waqaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama disingkat LWPNU, bertugas mengurus, mengelola serta mengembangkan tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama; Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama disingkat LBMNU, bertugas membahas masalah-masalah *maudlu'iyah* (tematik) dan *waqi'iyah* (aktual) yang akan menjadi Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama disingkat LTMNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pemberdayaan Masjid; Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama disingkat LKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesehatan.

¹⁰ **Lajnah** adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan program Nahdlatul Ulama yang memerlukan penanganan khusus Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama, disingkat LFNU, bertugas mengelola masalah ru'yah, hisab dan pengembangan Ilmu Falak; Lajnah Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama, disingkat LTNNU, bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/buku serta media informasi menurut faham Ahlussunnah wal Jamaah dan Lajnah Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama, disingkat LPTNU, bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama.

¹¹ **Badan Otonom** adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi

tersebut. Oleh karena itu, seharusnya terjadi sinergisitas pemberdayaan seluruh elemen NU. Hal itu tidak lain untuk memaksimalkan peran dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya urusan politik. Selain Fatayat dan Muslimat, terdapat juga Ansor, [Lakpesdam, LPNU, LKKNU, Lesbumi, dan masih banyak lagi, yang melakukan pemberdayaan secara bersama-sama demi tujuan besar NU.

Sinergisitas NU sebenarnya dapat dilakukan dengan modal besar yang paling kuat, yaitu *social capital* atau modal sosial.¹² Jumlah

melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Badan Otonom dikelompokkan dalam katagori Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu. Badan Otonomi tersebut adalah: Muslimat Nahdlatul Ulama disingkat Muslimat NU untuk anggota perempuan Nahdlatul Ulama; Fatayat Nahdlatul Ulama disingkat Fatayat NU untuk anggota perempuan muda Nahdlatul Ulama berusia maksimal (empat puluh) tahun; Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama disingkat GP Ansor NU untuk anggota laki-laki muda Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 40 (empat puluh) tahun; Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat IPNU untuk pelajar dan santri laki-laki Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 (tiga puluh) tahun; dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU untuk pelajar dan santri perempuan Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 (tiga puluh) tahun. Jam'iyah Ahlul Thaqafat Al-Mu'tabarah An-Nahdliyyah untuk anggota Nahdlatul Ulama pengamal thaqafat yang mu'tabar; Jam'iyatul Qurra Wal Huffazh, untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi Qori/Qoriah dan Hafizh/Hafizhah; Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama disingkat ISNU adalah Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual; Serikat Buruh Muslim Indonesia disingkat SARBUMUSI untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai buruh/karyawan/tenagakerja; Pagar Nusa untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak pada pengembangan seni bela diri; dan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama disingkat PERGUNU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai guru dan atau ustadz.

¹² *Social Capital* adalah kekuatan yang menggerakkan masyarakat, terbentuk melalui berbagai interaksi sosial dan institusi sosial. Menurut salah satu pengagap *social capital*, Robert Putnam, *social capital* adalah bagian dari organisasi sosial berupa hubungan sosial dan rasa saling percaya yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk kepentingan bersama. Putnam membuat perbedaan antara dua jenis *social capital* yaitu *bonding* dan *bridging social capital*. *Bonding* terjadi ketika suatu kelompok menguatkan ikatan berdasarkan kesamaan tertentu misalnya berdasarkan usia yang sama, ras yang sama, agama yang sama, dan sebagainya. Tetapi untuk menciptakan masyarakat yang damai di negara multi-etnis yang beragam, dibutuhkan jenis *social capital* yang kedua yaitu *bridging*. *Bridging* adalah proses interaksi sosial yang menjembatani kepentingan-kepentingan antar kelompok. *Bonding* akan menguatkan kohesi kelompok ke dalam, sedangkan *Bridging* akan menurunkan ketegangan antar kelompok, bahkan dalam tingkatan lebih lanjut akan meningkatkan kerjasama dan kerukunan antar kelompok yang berbeda. Lihat Putnam, R.D. 1996 'Bowling alone: America's declining social capital', *Journal of Democracy* 8:1 January 1995 pp65-78; Putnam, R.D., 1993, *Making Democracy Work, Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton University Press, New Jersey

Nahdlatul Ulama atau basis pendukungnya diperkirakan mencapai lebih dari 65 juta orang, dari beragam profesi. Sebagian besar dari mereka adalah rakyat jelata, baik di kota maupun di desa. Mereka memiliki kohesifitas yang tinggi karena secara sosial-ekonomi memiliki masalah yang sama, selain itu mereka juga sangat menjiwai ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah. Kohesifitas dalam bentuk modal sosial inilah yang bisa menjadi bahan bakar sinergisitas di semua bidang oleh warga NU.

Di sisi lain yang harus menjadi perhatian adalah pergeseran kelas masyarakat dan basis pendukung NU, sejalan dengan pembangunan dan perkembangan industrialisasi. Warga NU di desa banyak yang bermigrasi ke kota memasuki sektor industri. Jika selama ini basis NU lebih kuat di sektor pertanian di pedesaan, maka saat ini, pada sektor perburuhan di perkotaan, juga cukup dominan.

Demikian juga dengan terbukanya sistem pendidikan, basis intelektual NU juga semakin meluas, sejalan dengan cepatnya mobilitas dan perubahan sosial yang terjadi selama ini. Terlebih saat ini terdapat kecenderungan kalangan NU untuk menyekolahkan putera puterinya di pendidikan umum, bahkan banyak kader NU yang mengenyam pendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Kondisi perubahan ini menyebabkan munculnya kaum modern intelektual dalam tubuh NU.

Keadaan ini harus direspon oleh NU dengan menyiapkan formula pemberdayaan peran profesional dan kaum modern intelektual. Hal ini perlu dilakukan agar NU tidak mengalami siklus dominasi politik yang sejak dahulu dilakoni NU. Kekuasaan politik saat ini harus bisa menjadi arena bagi pemberdayaan kader-kader profesional dan intelektual tersebut. Bukankah jatuhnya Gus Dur dari kursi kepresidenan tidak lain dikarenakan kurang kuatnya penopang dalam aspek profesional dalam bidang-bidang spesifik.

Oleh karena itu, berbeda dengan para kalangan NU yang menolak masuknya kalangan profesional dan intelektual non-pesantren ke dalam tubuh NU, saya mendukung dan mendorong keterlibatan aktif dari seluruh jamaah NU dalam konteks pemberdayaan umat, baik dari kalangan pesantren maupun non-pesantren. Francis Fukuyama telah melakukan riset mendalam bahwa organisasi yang tidak mau membuka diri dalam

aspek manajemen dan pemberdayaan hanya akan menunggu kejatuhannya seiring dengan ketatnya kompetisi dan perubahan global.¹³

Epilog: Better Together

Sudah begitu lama NU sudah bersama Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Selama itu pula NU sudah memberikan sumbangsih besar kepada negara dan bangsa Indonesia. Sebagai organisasi yang besar dan tua, perjuangan NU dalam mengawal zaman akan semakin berat dan kompleks.

Kompleksnya zaman akan memberikan tekanan kepada NU untuk lebih memberdayakan elemen-elemen organisasi dalam menghadapi kompleksitas zaman tersebut. Di sisi lain pesona kekuasaan dan politik juga menjadi tantangan bagi NU untuk tidak terjebak dalam politik praktis. Tantangan zaman harus dihadapi, mau tidak mau, perubahan NU harus disertai pelibatan aktif seluruh elemen organisasi dan pemberdayaannya.